

	<b>News Title</b> : Bappebti Blokir 1.855 Situs Entitas PBK Ilegal	
	<b>Media Name</b> : Koran Jakarta	<b>Journalist</b> : ers/E-10
	<b>Publish Date</b> : 02 February 2024	<b>Tonality</b> : Positive
	<b>News Page</b> : 6	<b>News Value</b> : 90,000,000
	<b>Resources</b> : Kasan (Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI)), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan )	<b>Ads Value</b> : 30,000,000
	<b>Section/Rubrication</b> : Ekonomi	<b>Topic</b> : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

## Bursa Berjangka

# Bappebti Blokir 1.855 Situs Entitas PBK Ilegal

JAKARTA-Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada 2023 memblokir 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia me-

lalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (smartphone). Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkap Plt. Kepala Bappebti Kasan di Jakarta, Kamis (1/2).

Kasan menjelaskan Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ile-

gal. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK.

"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," jelas Kasan.

### Upaya Hukum

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison menegaskan setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. "Jika ditemukan adanya kegiatan

di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," tegas Aldison.

Situs web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. ■ ers/E-10